

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Anton Suyatno. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Kencana. Jakarta.
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti. 2004. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Jakarta.
- Imran Nating. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Jono. 2015. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan – Edisi Revisi*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Munir Fuady. 2001. *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2005. *Hukum Pailit dalam teori dan praktek*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-7. Kencana. Jakarta.
- , 2014. *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka. Jakarta.

- Rio Christiawan. 2020. *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- Rudy A Lontoh. 2011. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni. Bandung.
- R. Anton Suyatno. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya mencegah Kepailitan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan*. Softmedia. Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillisment verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- . 2016. *Sejarah, Asas, dan teori Hukum Kepailitan*. Kencana. Jakarta.

Jurnal

- Alex sandro. 2015. *Asas Pembuktian Secara Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Putusan Ma Ri No. 586/K/Pdt.Sus-Pailit/2013*. Repository usu. Medan.
- Andang Sari. 2017. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-Undang Kepailitan*. Jurnal Kajian Ilmiah_ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Vol. 17, Nomor 2 Mei.

- Annisa Fitria. 2018. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Salah Satu upaya Debitor mencegah Kepailitan*. Lex Jurnalica. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta. Vol. 15, Nomor 1 April.
- Dadang Firdaus. 2017. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian Pada Perseroang Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitor*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 10, Nomor 2 Januari.
- Denny Kusmawan. 2014. *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*. Jurnal Hukum. Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, Vol. 9, Nomor 2 Mei.
- Devi Indiani, Wiwin Budi Pertiwi. 2021. *Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan PKPU*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Volume 28 Issue 3.
- Elviana Sagala. 2015. *Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) untuk Menghindarkan Debitor dari Pailit*. Jurnal Ilmiah "Advokasi". STIH Labuhanbatu. Vol. 04, Nomor 1 Maret.
- Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta. 2010. *Kajian hukum tentang penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan asuransi*. Mimbar hukum. Volume 22 Nomor 3 oktober.
- Ida Naridah. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan*. Disertasi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Indah Wijayanti *et al.* 2015. *Penerapan penafsiran pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan (studi kasus nomor: 48/pailit/2012/PN.NIAGA.JK.PST dan Putusan Nomor: 704K/PDT.SUS/2012)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Juditia Damlah. 2017. *Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Lex Crimen. Fakultas Hukum Unsrat. Vol. VI Nomor 2 Maret-April.
- Novritsar Hasintongan Pakpahan. 2014. *Kewenangan Kreditor dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Skripsi Tesis. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

- Nurdin Andriani. 2011. *Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Persero Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Perekonomian Indonesia*. Disertasi. *Varia Peradilan*. Tahun IX Nomor 7, November 2011.
- Rindy Ayu Rahmadiyanti. 2015 . *Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. *Jurnal Notarius*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Edisi 08, Nomor 2 September 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.
- Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.

Internet

- Akses Internet di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57317f95c1900/dapatkah-mengajukan-pkpu-setelah-permohonan-pailit-ditolak-pengadilan/> diakses pada tanggal 27 April 2021.
- Akses internet di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57317f95c1900/dapatkah-mengajukan-pkpu-setelah-permohonan-pailit-ditolak-pengadilan/> diakses pada tanggal 27 April 2021.

Akses Internet di [Ulasan lengkap : kepailitan prudensial \(hukumonline.com\)](http://www.hukumonline.com) diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

Akses Internet di <https://abpadvocates.com/bisakah-permohonan-pkpu-diajukan-setelah-permohonan-pailit-ditolak-oleh-pengadilan-niaga-atau-sebaliknya-simak-dulu-aturannya/> diakses pada tanggal 06 Desember 2016 diakses pada tanggal 21 Mei 2021.

Akses Internet di <https://www.hukumonline.com/berita/a/perselisihan-hak-phk-lewat-instrumen-kepailitan-berdampak-negatif-bagi-perusahaan-lt617f8ffcb8922?page=all> diakses pada tanggal 08 Agustus 2022, pukul 19.00 WITA

Akses Internet pada <https://pdb-lawfirm.id/asas-nebis-in-idem-tidak-berlaku-dalam-pkpu/> diakses pada tanggal 08 Agustus 2022, Pukul 22.00 WITA

Akses Internet pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/kini--putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-asalkan-lt61b9b0007b883?page=all> diakses pada tanggal 08 Agustus 2022, Pukul 20.00 WITA

